

## MAKNA AKSES SEBAGAI PENGHUBUNG KEHIDUPAN BAGI MASYARAKAT DESA SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Elizabeth Maenitulo Duha<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada,  
Jalan Grafika no 2, Yogyakarta

<sup>1</sup> Email : [Elizabethmaenituloduha@mail.ugm.ac.id](mailto:Elizabethmaenituloduha@mail.ugm.ac.id)

Diterima (received): 04 November 2025

Disetujui (accepted): 02 Agustus 2026

### ABSTRAK

Kesenjangan pembangunan antarwilayah di daerah kepulauan seperti Kabupaten Nias Selatan masih menjadi persoalan mendasar yang berakar pada keterbatasan aksesibilitas fisik maupun sosial. Di banyak desa sangat tertinggal, akses tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan jalan, transportasi, atau jaringan komunikasi, tetapi sebagai “penghubung kehidupan” yang menentukan kelangsungan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta hubungan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna akses dari perspektif masyarakat lokal serta mengidentifikasi bagaimana keterbatasan akses memengaruhi struktur kehidupan sosial ekonomi di wilayah kepulauan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-induktif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di 16 desa dengan karakteristik geografis berbeda di Kabupaten Nias Selatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara tematik mengikuti model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses dipandang sebagai kebutuhan dasar yang menjadi penentu keberlangsungan aktivitas sehari-hari masyarakat. Ketika akses terputus akibat kondisi geografis atau cuaca ekstrem, seluruh aktivitas ekonomi terhenti, pendidikan terganggu, pelayanan kesehatan sulit dijangkau, dan masyarakat terpaksa menunda pemenuhan kebutuhan mendesak. Akses juga dipahami sebagai simbol martabat dan kemandirian desa, sejalan dengan praktik gotong royong warga dalam memperbaiki jalan atau membangun jembatan darurat ketika bantuan pemerintah tidak segera tersedia. Temuan ini mengungkap bahwa pendekatan pembangunan yang masih bersifat top-down belum sepenuhnya menangkap realitas spasial dan sosial masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan infrastruktur yang kontekstual, adaptif terhadap kondisi geografis, dan berbasis pengalaman hidup masyarakat lokal untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan seperti Nias Selatan.

**Kata Kunci** : aksesibilitas, pembangunan desa, masyarakat kepulauan, partisipasi lokal, Nias Selatan

### A. PENDAHULUAN

Kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki hambatan geografis. Kabupaten Nias Selatan, salah satu daerah kepulauan di Provinsi Sumatera Utara, menjadi contoh nyata ketertinggalan akibat keterbatasan aksesibilitas fisik dan sosial. Kondisi topografi berbukit, keterpencilan antar-pulau, dan minimnya infrastruktur transportasi menyebabkan banyak desa mengalami isolasi, terutama saat cuaca ekstrem. Dalam kondisi ini, masyarakat

menghadapi keterbatasan mobilitas dan kesulitan memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta akses ekonomi.

Pembangunan desa di wilayah kepulauan umumnya masih menggunakan pendekatan top-down, di mana prioritas ditentukan oleh indikator administratif seperti Indeks Desa Membangun (IDM) tanpa mempertimbangkan pengalaman hidup masyarakat dan tantangan geografis. Akibatnya, pembangunan fisik tidak selalu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Akses yang dipahami pemerintah sebagai jalan, jembatan, atau dermaga, oleh masyarakat justru dipandang sebagai “penghubung kehidupan” yang menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial. Ketika akses terputus, kehidupan desa praktis berhenti dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat melemah.

Keterbatasan akses tidak hanya berdampak pada mobilitas fisik, tetapi juga membentuk ketergantungan tinggi terhadap kondisi alam dan kebijakan eksternal. Di desa-desa yang hanya dapat dijangkau melalui laut, aktivitas ekonomi sangat bergantung pada kondisi gelombang. Saat cuaca buruk, hasil pertanian dan perikanan tidak dapat dipasarkan dan suplai logistik terhambat. Kondisi serupa terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, di mana anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah dan masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.

Literatur sebelumnya menyoroti pentingnya akses dalam peningkatan kesejahteraan pedesaan (Chambers, 1997; Ellis, 2000; Muta’ali, 2018), namun penelitian yang menggali makna akses dari perspektif masyarakat masih terbatas. Padahal, pemaknaan lokal ini penting untuk melihat keberhasilan pembangunan dari sudut pandang penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-induktif melalui wawancara dan observasi di 16 desa sangat tertinggal dengan tipologi geografis beragam (pesisir, kepulauan, dataran tinggi, dataran rendah, susur sungai, dan lembah). Fokus penelitian adalah menafsirkan makna “akses sebagai penghubung kehidupan” berdasarkan pengalaman masyarakat serta keterkaitannya dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

Selain itu, penelitian ini menyoroti strategi adaptif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan akses, seperti gotong royong memperbaiki jalan dan membangun jembatan darurat. Inisiatif ini mencerminkan kemandirian dan solidaritas sosial yang sering kali tidak tercermin dalam kebijakan formal. Oleh karena itu, memaknai ulang konsep akses dari perspektif masyarakat berarti mengarahkan paradigma pembangunan menuju pendekatan berbasis lokalitas, yang menempatkan akses sebagai syarat utama keberlanjutan hidup, bukan sekadar produk pembangunan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-induktif yang berorientasi pada pemahaman makna sosial di balik pengalaman masyarakat terhadap aksesibilitas. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak dapat dijelaskan melalui angka-angka statistik, melainkan memerlukan penelusuran mendalam terhadap cara masyarakat memahami dan merespons keterbatasan akses dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menangkap realitas sosial secara utuh serta menggali pandangan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan desa. Desain penelitian ini

bersifat eksploratif, dengan tujuan untuk menafsirkan konsep “akses sebagai penghubung kehidupan” berdasarkan pengalaman empiris masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Nias Selatan. Pendekatan induktif diterapkan agar temuan penelitian dapat berkembang secara alami dari data lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman konseptual baru yang berangkat dari konteks lokal masyarakat kepulauan.

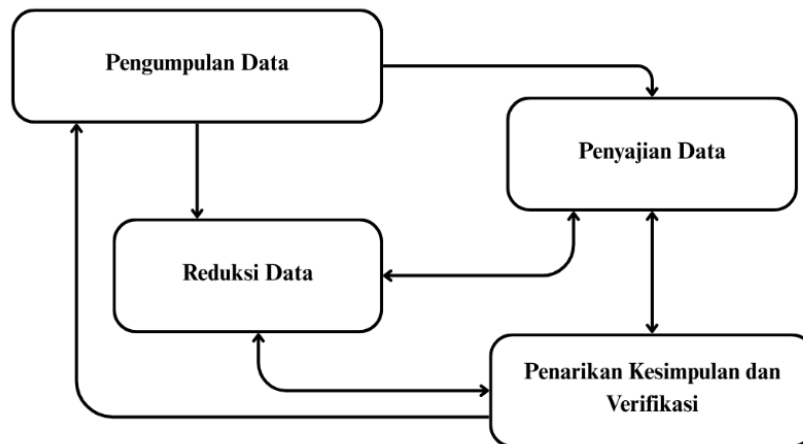
Penelitian dilaksanakan di enam belas desa sangat tertinggal di Kabupaten Nias Selatan yang dipilih secara purposive berdasarkan keragaman tipologi geografis dan tingkat keterpencilan. Desa-desa tersebut mewakili kondisi wilayah yang berbeda, mulai dari daerah kepulauan yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut, wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan pasang surut air laut, hingga kawasan dataran tinggi dengan kondisi jalan berbukit dan curam serta daerah susur sungai yang kerap terisolasi saat musim hujan. Keberagaman ini penting untuk menangkap variasi pengalaman masyarakat dalam memaknai akses dan peranannya terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka.

Informan penelitian terdiri dari dua sampai tiga orang setiap desa yang dipilih secara convenience sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap kondisi desa. Mereka meliputi kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan warga aktif yang terlibat dalam kegiatan dan merasakan proses serta hasil dari pembangunan. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip representativeness of experience, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman langsung terkait keterbatasan akses dan interaksi dengan infrastruktur desa. Dengan komposisi informan yang beragam, penelitian ini berupaya menangkap dinamika persepsi dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama, yakni wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan terbuka agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas namun tetap relevan dengan fokus penelitian. Pertanyaan difokuskan pada tiga aspek yakni pengalaman masyarakat terhadap akses fisik seperti jalan, jembatan, dan transportasi laut; dampak keterbatasan akses terhadap kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; serta bentuk partisipasi atau inisiatif lokal dalam memperbaiki akses di desanya. Semua wawancara direkam, ditranskrip secara verbatim, dan dianalisis untuk menemukan pola makna yang berulang. Observasi lapangan dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi nyata infrastruktur, rute perjalanan antarwilayah, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan mobilitas. Catatan lapangan dan dokumentasi visual turut digunakan untuk memperkaya interpretasi hasil wawancara. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa dokumen perencanaan desa, laporan pembangunan, peta aksesibilitas, serta data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai konteks pelengkap untuk memahami karakteristik spasial wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model (Miles et al., 2014) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari transkrip wawancara, kemudian menyusunnya dalam kelompok-kelompok tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi

dan matriks interpretatif untuk menemukan hubungan antar-konsep yang muncul dari lapangan. Melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding, ditemukan pola makna yang akhirnya membentuk tema utama “akses sebagai penghubung kehidupan”. Selama analisis berlangsung, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen sekunder untuk menjaga konsistensi temuan dan meningkatkan validitas data.



**Gambar 1** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles et al., 2014)

Melalui desain kualitatif-induktif ini, penelitian berupaya memahami bagaimana masyarakat desa memaknai akses sebagai bagian integral dari keberlangsungan hidup mereka, serta bagaimana keterbatasan akses membentuk dinamika sosial ekonomi di wilayah kepulauan yang rentan dan terisolasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap pengalaman dan nilai-nilai lokal masyarakat Nias Selatan secara lebih kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat lokal.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa bagi masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Nias Selatan, akses bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam pandangan masyarakat, akses dipahami sebagai “penghubung kehidupan”, suatu istilah yang menggambarkan peran vitalnya dalam menjamin keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Temuan ini muncul secara konsisten dari berbagai wawancara dan observasi lapangan di seluruh tipologi wilayah, baik di desa kepulauan, pesisir, dataran tinggi, maupun susur sungai. Makna “akses” yang diungkap masyarakat memperlihatkan bahwa keterhubungan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolis dan sosial, karena menentukan sejauh mana masyarakat dapat menjalani hidup secara layak dan mandiri.

#### **1. Akses sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat**

Bagi masyarakat desa sangat tertinggal di Nias Selatan, akses bukan hanya sekadar sarana fisik berupa jalan, jembatan, atau transportasi, tetapi telah menjadi

kebutuhan dasar yang menentukan kelangsungan hidup sehari-hari. Akses adalah prasyarat bagi seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar. Masyarakat tidak memandangnya sebagai simbol pembangunan, melainkan sebagai “urat nadi” yang menghubungkan mereka dengan dunia luar dengan pendidikan, kesehatan, dan pasar. Seperti dikatakan oleh salah satu warga,

*“kalau sungai lagi meluap, kami tidak bisa keluar dari desa...”* (Warga Desa Sindrolo)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa akses bukanlah kemewahan, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang menentukan apakah mereka dapat bersekolah, berobat, atau bekerja. Dalam konteks pendidikan, keterbatasan akses membuat kesempatan belajar anak-anak di desa sangat terbatas. Banyak desa tidak memiliki sekolah menengah, sehingga siswa harus berjalan jauh atau menyeberangi daerah rawan untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu warga menyampaikan,

*“Untuk sekolah seperti SMP dan SMA kurang dibutuhkan karena jumlah anak SD-nya saja masih kurang, justru dari pinggir jalan masuk sekolah sudah susah.”* (Warga Desa Hilimbowo)

Kutipan ini menggambarkan bahwa keterbatasan fisik secara langsung memengaruhi minat dan kemampuan anak-anak untuk bersekolah, sekaligus memperlihatkan adanya ketimpangan spasial dalam pelayanan pendidikan. Di sisi lain, masyarakat sebenarnya menyadari pentingnya pendidikan, tetapi kondisi geografis dan infrastruktur membuat mereka terpaksa menyesuaikan diri. Keterbatasan akses juga menjadi kendala utama dalam pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan sulit dijangkau karena jarak dan medan yang berat.

*“Kalau ada yang parah, kita langsung ke kecamatan sebelah. Karena akses jalannya sulit, kami kadang terpaksa menunggu bantuan datang...”* (Warga Desa Puncak Lolomatua)

Dalam banyak kasus, warga tidak dapat segera mengakses layanan medis, bahkan untuk kondisi darurat. Beberapa informan menuturkan bahwa *“tenaga kesehatan tidak tersedia”* dan *“tempat berobat tidak ada,”* memperkuat pandangan bahwa keterbatasan akses fisik menjadi hambatan utama bagi pemenuhan hak dasar warga atas kesehatan. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem memperparah keterbatasan mobilitas. Jalan tanah yang belum disemen sering kali tidak dapat dilalui ketika musim hujan.

*“Jalan kami licin kalau hujan, kendaraan tidak bisa lewat, hasil kebun busuk di rumah,”* (Warga Desa Tobualo).

Ketika jalan rusak, masyarakat kehilangan akses terhadap pasar, sekolah, bahkan komunikasi sosial antarwilayah. Fenomena ini menegaskan bahwa akses fisik bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga tentang ketahanan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi perubahan alam. Cuaca dan geografis di

wilayah kepulauan seperti Nias Selatan membuat akses menjadi sangat dinamis, sering kali berubah antara “tersedia” dan “tertutup” tergantung musim. Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, masyarakat berupaya untuk beradaptasi dengan merencanakan kegiatan berdasarkan kondisi akses. Salah satu informan menyebut,

*“Pada saat hujan atau banjir, Masyarakat kesulitan untuk pergi keluar desa untuk membeli logistik. Jadinya hanya mengandalkan bahan hasil kebun dan makanan yang ada saja”* (Warga Desa Hilimbowo)

Adaptasi semacam ini menunjukkan bentuk rasionalitas lokal yang berakar pada pengalaman hidup dalam kondisi keterisolasian. Mereka telah mengembangkan strategi bertahan yang tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, melainkan pada pengetahuan lokal tentang cuaca, jarak, dan kondisi jalan. Akses juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan informasi dan mobilitas sosial. Banyak warga mengeluh tidak dapat memperoleh informasi penting karena keterbatasan jaringan komunikasi.

*“Kami sering tidak dapat informasi seperti CPNS, itupun sulit untuk mendaftar karena internet tidak sampai di sini,”* (Warga Desa Maufa)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses informasi telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar di era digital, setara pentingnya dengan akses jalan dan transportasi. Ketika akses informasi terputus, masyarakat kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa akses dalam pandangan masyarakat bukanlah fasilitas tambahan, melainkan fondasi bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Konsep ini sejalan dengan pandangan Sen (1999) tentang capability approach, di mana kemampuan seseorang untuk hidup layak sangat ditentukan oleh akses terhadap sumber daya dan peluang. Dalam konteks Nias Selatan, kemampuan masyarakat untuk berpendidikan, bekerja, dan sehat sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka dapat terhubung dengan dunia luar. Oleh karena itu, akses di sini tidak hanya berarti mobilitas fisik, tetapi juga mencerminkan freedom to function, kebebasan untuk menjalankan kehidupan yang mereka nilai penting. Dengan demikian, makna “akses” bagi masyarakat desa sangat tertinggal di Nias Selatan melampaui batas pengertian teknis pembangunan. Ia adalah simbol kehidupan yang menentukan eksistensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiadaan akses bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka sendiri.

## **2. Keterisolasian dan Dampak Sosial Ekonomi**

Keterisolasian menjadi kondisi yang paling nyata dan dirasakan oleh masyarakat di desa-desa sangat tertinggal di Nias Selatan. Letak geografis yang sulit dijangkau, ditambah kondisi infrastruktur yang terbatas dan rentan rusak karena cuaca, membuat desa-desa ini sering terputus dari jaringan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, keterisolasian bukan sekadar soal jarak fisik, melainkan

kondisi struktural yang membatasi pilihan hidup masyarakat. Salah satu warga menuturkan,

*“Kalau jalan putus, kami tidak bisa jual hasil kebun dan memperoleh logistik. Kadang hanya bisa makan sagu karena kapal tak datang.”* (Warga Desa Silina)

Kutipan ini memperlihatkan bahwa setiap kali akses terganggu, dampaknya langsung terasa pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Aktivitas produksi dan distribusi menjadi terhenti, sementara kebutuhan dasar tetap berjalan, menciptakan tekanan ekonomi yang berulang. Bagi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian dan kebun, keterisolasian berdampak langsung terhadap pendapatan. Hasil kebun yang seharusnya dijual ke pasar sering kali rusak karena tidak ada sarana transportasi yang bisa dilalui.

*“Hasil kebun busuk di rumah karena sungai yang tidak bisa dilewati,”* (Warga Desa Sindrolo)

Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur jalan menciptakan rantai kerugian ekonomi yang panjang, di mana produktivitas masyarakat tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengakses pasar. Dalam kerangka teori livelihood (Ellis, 2000), kondisi ini mencerminkan keterbatasan access asset yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mengonversi hasil kerja menjadi modal ekonomi. Selain berdampak pada ekonomi, keterisolasian juga menimbulkan kerugian sosial yang signifikan. Banyak warga mengaku kesulitan mengakses informasi dan pelayanan publik, terutama ketika jaringan komunikasi terputus.

*“Kami sering tidak dapat informasi seperti CPNS, itupun sulit mendaftar karena internet tidak sampai di sini,”* (Warga Desa Maufa)

Kondisi ini menyebabkan masyarakat tertinggal dalam arus informasi dan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat di wilayah lain. Akses yang terbatas menjadikan mereka terpinggirkan dalam proses pembangunan dan mengurangi partisipasi sosial mereka di tingkat yang lebih luas. Dalam konteks social exclusion, situasi ini menggambarkan bagaimana keterisolasian geografis berujung pada keterisolasian sosial. Keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk merencanakan kehidupan secara produktif. Banyak kegiatan ekonomi bergantung pada kondisi cuaca dan akses jalan. Salah satu warga menuturkan,

*“Pada saat hujan atau banjir, Masyarakat kesulitan untuk pergi keluar desa untuk membeli logistik. Jadinya hanya mengandalkan bahan hasil kebun dan makanan yang ada saja”* (Warga Desa Hilimbowo)

Adaptasi semacam ini merupakan bentuk respon lokal terhadap keterisolasian, di mana masyarakat menyesuaikan aktivitas mereka dengan kondisi lingkungan. Meskipun tampak rasional, kondisi ini juga menunjukkan keterbatasan agency

masyarakat dalam menentukan pilihan hidup. Mereka tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan waktu dan arah kegiatan ekonomi, karena semua tergantung pada kondisi akses yang sering kali tidak menentu. Dalam jangka panjang, keterisolasian memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Ketika akses jalan dan transportasi tidak dapat digunakan, harga barang meningkat karena biaya distribusi tinggi, sementara pendapatan masyarakat menurun.

*“Kalau harga bahan naik, kami susah karena penghasilan tetap kecil,”* (Warga Desa Maufa)

Kondisi ini menunjukkan adanya spatial poverty trap, di mana lokasi geografis dan keterbatasan infrastruktur menciptakan kemiskinan yang bersifat struktural. Masyarakat tidak hanya miskin karena kurangnya sumber daya, tetapi juga karena keterbatasan untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial di luar wilayahnya. Keterisolasian juga memperburuk pelayanan publik dan memperlebar kesenjangan antarwilayah. Banyak warga mengeluh bahwa fasilitas umum seperti listrik, air bersih, dan layanan kesehatan tidak merata.

*“Kami sudah sering mengajukan agar PLN masuk ke pulau kami, tapi belum ada respon dari pemerintah,”* (Desa Maufa)

*“...bawa perintah ke PLN, hasil survey katanya ini sangat sulit pemasangannya,”* (Desa Dao-Dao)

Keterbatasan akses energi dan fasilitas publik memperburuk kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mempertegas ketimpangan spasial sebagaimana diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020), bahwa daerah kepulauan dan pegunungan masih menghadapi hambatan tinggi biaya infrastruktur dan risiko bencana alam. Dalam konteks ini, keterisolasian bukan hanya akibat letak geografis, tetapi juga produk dari kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya memahami dinamika wilayah kepulauan.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa keterisolasian memiliki efek domino terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya membatasi pergerakan, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi, pola adaptasi, hingga pandangan hidup masyarakat terhadap masa depan. Masyarakat terbiasa hidup dalam siklus “terbuka dan tertutup” akses, di mana setiap kemajuan ekonomi bisa dengan cepat hilang ketika hujan atau bencana datang. Dalam kerangka teori pembangunan inklusif, keterisolasian ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang berbasis pada kerentanan spasial dan pengalaman lokal, bukan sekadar standar teknis infrastruktur. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan karakter geografis kepulauan hanya akan memperpanjang rantai keterisolasian sosial ekonomi yang telah berlangsung lama di wilayah seperti Nias Selatan.

### **3. Akses sebagai Simbol Kemandirian dan Konektivitas Sosial**

Bagi masyarakat di desa sangat tertinggal di Nias Selatan, akses tidak hanya dipahami sebagai sarana fisik untuk keluar masuk wilayah, tetapi telah menjadi simbol kemandirian dan keberadaan sosial mereka. Ketika infrastruktur tidak memadai, masyarakat tidak sekadar menunggu bantuan dari luar, melainkan berupaya menciptakan solusi sendiri melalui gotong royong dan pengetahuan lokal. Akses menjadi cerminan daya tahan sosial seperti sebuah bentuk agency kolektif untuk mempertahankan kehidupan di tengah keterbatasan. Seperti diungkapkan oleh salah satu warga,

*“Kami biasa kerja sama-sama untuk perbaiki jalan alternatif biar anak-anak bisa ke sekolah.”* (Warga Desa Dao-Dao)

Kalimat ini tidak hanya menggambarkan partisipasi masyarakat, tetapi juga mengandung makna simbolis bahwa akses adalah hasil perjuangan bersama, bukan sekadar hasil proyek pembangunan. Nilai kemandirian ini tumbuh dari kondisi isolasi yang berkepanjangan. Ketiadaan akses memaksa masyarakat mengembangkan kreativitas dalam mengelola sumber daya lokal. Mereka membuat jembatan sederhana dari batang kelapa, memperbaiki jalan dengan peralatan seadanya, dan mengatur jadwal perjalanan berdasarkan kondisi cuaca.

*“Kalau hujan besar, kami tidak memutuskan keluar desa karena pasti jalan berbahaya. Tapi kalau sudah kering, kami kerja bakti perbaiki bersama,”* (Warga Desa Sindrolo)

Pola perilaku semacam ini menunjukkan bagaimana masyarakat menjadikan akses sebagai ruang sosial untuk memperkuat solidaritas dan kohesi komunitas. Dalam kondisi terbatas, mereka tidak kehilangan semangat kolektif, justru menjadikan keterbatasan sebagai titik tumbuhnya kemandirian. Makna kemandirian dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari semangat self-reliance yang telah lama menjadi karakter masyarakat kepulauan. Ketika pembangunan top-down sering kali gagal menyentuh kebutuhan lokal, masyarakat justru mengembangkan sistem adaptasi berbasis solidaritas. Mereka tidak pasif menunggu pembangunan, melainkan aktif mengisi kekosongan akses dengan tindakan kolektif.

*“...warga desa mau juga membantu memikul pasti siap mereka bantu-bantu asal listrik masuk. Kami tidak bisa menunggu terus walaupun jalan rusak...”* (Kepala Desa Dao-Dao)

Ungkapan ini menegaskan bahwa akses bagi mereka adalah bentuk kedaulatan sosial, di mana kemampuan untuk menghubungkan diri dengan dunia luar adalah simbol eksistensi dan martabat komunitas. Selain itu, akses juga menjadi simbol konektivitas sosial yang melampaui batas geografis. Dalam pandangan masyarakat, akses memungkinkan pertukaran nilai, informasi, dan identitas dengan dunia luar. Ketika akses terputus, mereka merasa terasing bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan emosional.

*“Kalau tidak ada kapal, kami jadi merasa sulit berinteraksi dengan orang di luar pulau terutama saat ada acara,” (Warga Desa Silina)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akses dipersepsi sebagai jembatan sosial yang menghubungkan mereka dengan kemajuan dan rasa kebersamaan nasional. Dengan demikian, keterhubungan bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga bagian dari struktur identitas kolektif masyarakat kepulauan. Konektivitas sosial ini juga terlihat dari cara masyarakat membangun komunikasi dan jejaring informal antarwilayah. Dalam kondisi jaringan internet terbatas, mereka memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh sesama warga. Seperti salah satu warga yang memiliki usaha dibidang logistik, dia memiliki fasilitas internet satelit sehingga masyarakat desa mengandalkan keberadaan internet ini walaupun masih dalam kondisi jaringan yang sangat minim. Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa akses bukan hanya urusan infrastruktur teknologi, tetapi juga budaya komunikasi yang terbentuk dari pengalaman hidup di wilayah yang terisolasi. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar korban dari keterbatasan akses, melainkan juga agen yang menciptakan sistem komunikasi alternatif berdasarkan solidaritas dan kebiasaan lokal.

Dari perspektif teoritis, kondisi ini memperkuat gagasan community-based development (Chambers, 1997), di mana masyarakat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama yang menentukan bentuk dan arah kemajuan di wilayahnya. Pengalaman empiris di Nias Selatan menunjukkan bahwa akses menjadi medium bagi masyarakat untuk menegaskan identitas sosialnya sebagai komunitas yang mampu bertahan dan beradaptasi. Ketika akses diperjuangkan bersama, ia menjadi simbol kekuatan kolektif dan kebanggaan sosial. Pembangunan yang tidak mengakui peran sosial akses ini cenderung gagal, karena mengabaikan nilai-nilai kemandirian dan solidaritas yang telah tertanam dalam masyarakat.

Dengan demikian, akses dalam konteks masyarakat sangat tertinggal di Nias Selatan memiliki makna ganda, di satu sisi, ia adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan di sisi lain, ia adalah simbol kemandirian dan konektivitas sosial yang menegaskan eksistensi mereka di tengah keterpencilan geografis. Ketika masyarakat memperbaiki jalan dengan tangan sendiri atau menyeberangi laut untuk membawa hasil kebun, mereka sedang menegaskan keberadaannya dalam ruang pembangunan nasional. Akses, dalam pengertian ini, bukan sekadar jalur fisik, tetapi juga manifestasi dari kehendak hidup yang otonom dan bermartabat.

#### **4. Diskusi Teoritis**

Temuan penelitian mengenai makna “akses sebagai penghubung kehidupan” memperluas pemahaman tentang konsep aksesibilitas dalam pembangunan perdesaan. Selama ini, sebagian besar literatur memandang akses terutama sebagai unsur fisik yang mendukung mobilitas ekonomi dan distribusi pembangunan (Hansen, 1959; Muta’ali, 2018). Dalam perspektif klasik tersebut, semakin tinggi tingkat aksesibilitas, maka semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat desa sangat tertinggal, akses memiliki makna yang jauh lebih kompleks: bukan

sekadar infrastruktur atau jarak tempuh, melainkan jaringan kehidupan yang menyatukan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemahaman ini memperluas definisi akses sebagaimana diuraikan oleh Chambers (1997), yang menyebutkan bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat terjadi bila masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya dan peluang hidup. Dalam konteks Nias Selatan, keterbatasan akses tidak hanya menghambat mobilitas fisik, tetapi juga mengekang kebebasan substantif masyarakat dalam menentukan pilihan hidup, sebagaimana dijelaskan oleh Sen (1999) dalam *Development as Freedom*. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori pembangunan partisipatif yang menempatkan akses sebagai dimensi kebebasan, bukan semata produk infrastruktur.

Selanjutnya, temuan bahwa masyarakat memandang akses sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat kehidupan menegaskan pentingnya mengaitkan teori aksesibilitas dengan teori livelihood. Dalam kerangka sustainable livelihoods Ellis (2000), akses merupakan modal yang memungkinkan masyarakat mengonversi aset alam dan sosial menjadi strategi bertahan hidup. Dalam masyarakat kepulauan seperti Nias Selatan, ketika akses fisik terputus, seluruh sistem livelihood ikut lumpuh seperti kegiatan ekonomi berhenti, pendidikan terganggu, dan kesehatan tidak terlayani. Artinya, akses di sini bukan sekadar faktor penunjang, melainkan inti dari sistem keberlanjutan sosial ekonomi.

Lebih jauh, keterisolasian geografis yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat argumen teori spatial inequality yang menyoroti hubungan antara jarak, konektivitas, dan ketimpangan pembangunan. Hansen (1959) menjelaskan bahwa wilayah dengan akses tinggi akan tumbuh lebih cepat karena memiliki hubungan pasar dan mobilitas tenaga kerja yang lebih baik, sedangkan wilayah dengan akses rendah cenderung tertinggal. Dalam konteks Nias Selatan, ketimpangan ini tidak hanya terjadi antarwilayah tetapi juga antarwaktu ketika cuaca ekstrem datang, desa yang sebelumnya terhubung bisa tiba-tiba terisolasi total. Artinya, ketimpangan akses di daerah kepulauan bersifat dinamis dan temporal, dipengaruhi oleh kondisi alam dan ketersediaan sarana transportasi. Temuan ini memperkaya teori ketimpangan spasial dengan dimensi temporality dan vulnerability, dua faktor yang jarang disoroti dalam kajian pembangunan wilayah.

Dari sisi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa keterisolasian bukan hanya persoalan jarak fisik, tetapi juga bentuk eksklusi sosial. Masyarakat di wilayah terluar sering merasa diabaikan oleh kebijakan pemerintah karena program pembangunan tidak mempertimbangkan kondisi geografis mereka. Fenomena ini memperkuat kritik Scott (1998) dalam *Seeing Like a State*, bahwa kebijakan yang terlalu teknokratik sering kali gagal memahami realitas lokal dan justru memperkuat ketimpangan yang ada. Dalam kasus Nias Selatan, pendekatan pembangunan yang seragam justru memperlihatkan bias struktural terhadap wilayah pusat yang lebih mudah dijangkau. Oleh karena itu, akses dalam arti sosial-politik dapat pula dimaknai sebagai sarana representasi dari ruang bagi masyarakat desa untuk dilihat, diakui, dan didengarkan dalam proses pembangunan.

Temuan lapangan mengenai inisiatif masyarakat memperbaiki jalan dan jembatan dengan gotong royong memperlihatkan relevansi teori Asset-Based Community Development (ABCD) (Kretzmann et al., 1993). Pendekatan ABCD

menekankan bahwa setiap komunitas memiliki potensi dan aset internal yang dapat menjadi sumber kekuatan pembangunan. Dalam kondisi minim intervensi pemerintah, masyarakat Nias Selatan memanfaatkan aset sosial seperti solidaritas, kerja sama, dan kepercayaan untuk membangun akses alternatif. Praktik ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar hasil kebijakan, melainkan kebutuhan sosial yang muncul secara alami untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa partisipasi lokal adalah bagian inheren dari pembangunan berbasis kebutuhan (Chambers, 1994), bukan tambahan prosedural yang ditempel pada proyek-proyek pemerintah.

Dalam kerangka teoretik yang lebih luas, makna “akses sebagai penghubung kehidupan” mengandung dimensi normatif baru bagi teori pembangunan desa di wilayah kepulauan. Akses tidak lagi sekadar variabel input pembangunan, tetapi juga variabel yang bersifat *enabling* yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi, berinteraksi, dan membangun kemandirian. Dengan menempatkan akses sebagai pusat relasi antara manusia dan ruang, hasil penelitian ini mendorong pembacaan baru terhadap teori *place-based development*, yaitu pendekatan yang mengakui setiap tempat memiliki karakter unik dan harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan lokal (Barca et al., 2012). Dalam konteks ini, desa-desa di Nias Selatan menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil harus tumbuh dari pemahaman masyarakat terhadap ruang hidupnya sendiri.

Diskusi ini juga memperlihatkan bahwa konsep akses yang dimaksudkan masyarakat Nias Selatan bersifat *multi-layered*. Di satu sisi, ia bersifat material karena terkait dengan prasarana fisik; di sisi lain, ia bersifat simbolik karena mencerminkan keterhubungan sosial dan eksistensi komunitas. Ketika masyarakat berbicara tentang jalan atau jembatan, yang mereka maksud bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga saluran untuk menjaga hubungan sosial, menumbuhkan solidaritas, dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai kolektif. Dengan demikian, akses dapat dibaca sebagai metafora bagi *social connectivity*, yaitu jaringan makna yang menghubungkan manusia satu sama lain serta dengan lingkungan tempat mereka hidup.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa teori pembangunan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan geografisnya. Pembangunan desa di wilayah kepulauan seperti Nias Selatan memerlukan paradigma yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi kerentanan lingkungan serta realitas sosial masyarakat. Dalam paradigma ini, akses tidak lagi ditempatkan sebagai variabel pelengkap, tetapi sebagai titik berangkat dari seluruh proses pembangunan. Akses menjadi kunci untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi, berpartisipasi, dan mempertahankan kehidupan mereka di tengah keterbatasan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menawarkan kontribusi bagi pengembangan teori pembangunan desa yang berbasis pada tiga prinsip utama yakni akses sebagai prasyarat kehidupan dan kebebasan sosial, akses sebagai mekanisme penghubung antara manusia dan ruang, serta akses sebagai sarana pembentukan kemandirian komunitas. Integrasi ketiga prinsip ini menghasilkan pemahaman baru bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan infrastruktur, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai, menggunakan, dan merawat akses tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori-teori sebelumnya tentang pentingnya aksesibilitas dalam pembangunan perdesaan, tetapi juga memberikan perluasan teoretik yang berangkat dari konteks lokal wilayah kepulauan. Perspektif “akses sebagai penghubung kehidupan” memperkaya diskursus pembangunan dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pemakna dan pengelola utama dari akses itu sendiri. Temuan ini sekaligus menjadi kritik terhadap paradigma pembangunan yang masih top-down dan membuka jalan bagi pendekatan baru yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa akses memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat desa sangat tertinggal di Kabupaten Nias Selatan. Bagi masyarakat, akses tidak hanya dimaknai sebagai prasarana fisik seperti jalan, jembatan, atau transportasi, melainkan sebagai penghubung kehidupan yang memungkinkan seluruh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya berjalan secara berkesinambungan. Akses menjadi simbol keterhubungan dan eksistensi sosial yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat bertahan dan berkembang di tengah keterbatasan geografis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses tidak sekadar menciptakan kesulitan mobilitas, tetapi juga menimbulkan efek berantai terhadap berbagai aspek kehidupan. Ketika akses terputus karena kondisi alam atau kerusakan infrastruktur, aktivitas ekonomi berhenti, proses pendidikan terganggu, dan pelayanan kesehatan menjadi tidak terjangkau. Dalam situasi tersebut, masyarakat kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat ketergantungan terhadap faktor eksternal. Dengan demikian, akses menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya salah satu indikator pembangunan desa.

Selain berfungsi sebagai prasyarat kehidupan, akses juga memiliki makna sosial yang mendalam. Keterisolasian yang dialami masyarakat desa sangat tertinggal menciptakan bentuk eksklusi sosial yang menimbulkan perasaan terpinggirkan dari proses pembangunan. Namun, di tengah keterbatasan itu, muncul inisiatif-inisiatif lokal yang mencerminkan daya tahan dan solidaritas sosial. Masyarakat membangun jembatan darurat, memperbaiki jalan dengan gotong royong, dan menciptakan mekanisme transportasi mandiri untuk memastikan keterhubungan tetap terjaga. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak pasif dalam menghadapi keterbatasan, melainkan aktif menciptakan solusi berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperluas pemahaman terhadap teori aksesibilitas dan pembangunan perdesaan. Akses tidak dapat dipahami semata sebagai sarana pendukung pembangunan, melainkan sebagai inti dari keberlanjutan sosial ekonomi. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Nias Selatan, akses berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan ruang, serta antara masyarakat dan negara. Akses menjadi medium yang menghubungkan kebijakan makro dengan

realitas mikro, sekaligus menentukan sejauh mana pembangunan dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.

Makna “akses sebagai penghubung kehidupan” yang diungkap dalam penelitian ini mengandung pesan bahwa pembangunan desa harus dimulai dari pengakuan terhadap pengalaman dan persepsi masyarakat sendiri. Akses, dalam arti yang lebih luas, adalah hak dasar untuk hidup layak, untuk terhubung dengan dunia luar, dan untuk memiliki kesempatan yang setara dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang akses yang lahir dari pengalaman masyarakat desa sangat tertinggal di Nias Selatan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkeadilan spasial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf)
- Barca, F., McCann, P., & Rodriguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. In *World Development* (Vol. 22, Issue 9). [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Hansen, N. M. (1959). The structure and determinants of local public investment expenditures. *The Review of Economics and Statistics*, 41(2), 150–162. <https://doi.org/10.2307/1927185>
- Kretzmann, J. P., McKnight, J. L., John Kretzmann, by, McKnight, J., Walsh, E., Birk, X., Murray, A., Deaton, R., Ellis, M., George, C., Newsome, Y., Moore, D., Puntenney, D., Schmidt, J., Serwer, T., Wilson Valued colleagues Stan Hallett, J., Payne, C., & Dewar, T. (1993). *BUILDING COMMUNITIES FROM THE INSIDE OUT: A PATH TOWARD FINDING AND MOBILIZING A COMMUNITYS ASSETS* This guide reflects the hard work of lots of good people.
- Miles, M. B., Saldaña, J., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative-Data-Analysis*.
- Muta'ali, L. (2018). *Perencanaan pembangunan wilayah berbasis daya dukung lingkungan*.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.